PENGARUH PDRB, PMA DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

Ahmad Zulkarnain

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

PENGARUH PDRB, PMA DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

AHMAD ZULKARNAIN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Ordinary Least Squere (OLS)* dan konsep elastisitas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tahunan. Hasil penelitian menunjukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja dan UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Lampung.

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing (PMA), Dan Upah Minimum Provinsi (UMP).

ABSTRACT

EFFECT OF GRDP, FDI AND WAGES MINIMUM PROVINCE ON WORK OPPORTUNITIES IN LAMPUNG PROVINCE

By

AHMAD ZULKARNAIN

This study aims to find out Gross Regional Domestic Product (PDRB), Foreign Investment (PMA), and Provincial Minimum Wages Against Job Opportunities in Lampung Province. The method used in this research is Ordinary Least Squere (OLS) method. The data used are secondary data obtained on an annual basis. The result of research shows that PDRB has positive and significant effect to job opportunity, FDI has a positive and significant impact on employment and UMP has significant negative effect on employment in Lampung Province.

Keywords: Gross Regional Domestic Product (GDP), Foreign Investment (PMA), And Provincial Minimum Wage (UMP).

PENGARUH PDRB, PMA DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Ahmad Zulkarnain

SKRIPSI

Sebagai Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **PENGARUH PDRB, PMA DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Ahmad Zulkarnain*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1111021008

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Saimul, S.E., M.Si.
NIP 19600918 198703 1 002

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Saimul, S.E., M.Si.** .....

Penguji I : **Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M.** .....

Penguji II : **Zulfa Emalia, S.E., M.Sc.** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Mei 2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku".

Bandar Lampung, 25 Juni 2018
Penulis

METERAI TEMPEL
06A7FAEF981190378
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Zulkarnain

Riwayat Hidup

Dua puluh empat tahun lalu tepatnya di desa Kertasana, Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, penulis lahir pada tanggal 10 November 1993 sebagai seorang anak laki-laki tunggal, buah cinta dari pasangan bapak Mustofa dan ibu Rubaiyah dengan nama Ahmad Zulkarnain.

Penulis memulai pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri 1 Kertasana pada tahun 1999. Kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kedondong diselesaikan pada tahun 2008 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kedondong diselesaikan pada tahun 2011.

Pada tahun 2011 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Jurusan Ekonomi Pembangunan. Penulis pernah mengikuti kuliah kerja lapangan (KKL) pada tahun 2013 di Bank Indonesia, dan Kementrian Koperasi Republik Indonesia. Selama masa kuliah penulis aktif di organisasi ROIS FEB Kampus Universitas Lampung.

MOTTO

“Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram”

(Q.S. Ar Ra’d:28)

“Jika kita tak tahan menahan lelahnya belajar maka kita akan menanggung perihnya kebodohan”

(Imam Syafei)

“Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses tapi jadilah seseorang yang bernilai”

(Albert Einstien)

“Jadilah diri sendiri, karena jadi diri sendiri lebih baik dara pada harus mengada-ada yang tidak ada pada diri kita”

(Ahmad Zulkarnain)

PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Karya ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku, yang selalu memberikan cinta, kasih sayangnya, dukungan serta doa.

Dosen-dosen serta sahabat-sahabat terbaik yang turut memberikan arahan, dukungan, juga doa yang menambahkan semangat atas selesainya skripsi ini.

Almamater tercinta jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Terima Kasih

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh PDRB, PMA Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Lampung" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan doa selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Bapak Dr. Saimul, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing.
5. Ibu Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M selaku dosen penguji.
6. Ibu DR. Ida Budiarty, S.E.,M.Si selaku dosen penguji.
7. Ibu Zulfa Emalia, S.E.,M.Sc selaku dosen penguji.
8. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik.

9. Keluargaku : Papa dan mama yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan selalu memberikan senyuman penyemangat serta doa yang tulus ikhlas.
10. Dosen-dosen di jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya selama menuntut ilmu di Universitas Lampung.
11. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ibu Hudaiyah, Bang Fery, Bang Ma'ruf, Ibu Yati, Pakde, serta pegawai lainnya yang telah banyak membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman Ekonomi Pembangunan : Habib, Sunarmo, Syahid, Anggi, Ade, Arif, Hamid, Fadil, Mustakim, Adi, Royiv, Dito, Habibi, Suryanto, Asdi, Faisal, Efran, Doni, dan lain-lain. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
13. Teman-teman ROIS FEB Unila: Ka didik, Aan, Rio, Singgih, Abe, Mahipal, Andi, Angga, Khoiruddin, Yuriko, dan lain-lain. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
14. Teman-teman KKN desa Gisting Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan, Februari 2015: Briyan, Nanda Catur, Danu, Aziza, Ayu, Delima, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah di berikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 25 Juni 2018

Penulis.

Ahmad Zulkarnain

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR LAMPIRAN …….. v

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12

II. LANDASAN TEORI,

A. Ketenagakerjaan 13
B. Teori Ketenagakerjaan 17
C. Permintaan dan Penawarn Tenaga Kera……..... 19
D. Kesempatan Kerja 23
E. Definisi PDRB 28
F. Hubungan PDRB dengan kesempatan kerja 31
G. Investasi…… 31
H. Teori Upah 38
I. Studi Empiris..... 49
J. Kerangka Pemikiran…….. 51
1. Hipotesis ……..……. …..... 53

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data 54
B. Metode Pengumpulan Data 54
C. Variabel Penelitian 55
D. Definisi Operasional Variabel 55
E. Metode Analisis……. 56
F. Uji Asumsi Klasik…….. 57

1. Uji Normalitas 58
2. Uji Multikolinearitas 58
3. Uji Autokorelasi 59
4. Uji Heteroskedastisitas 60

G. Uji Hipotesis……... 61
1. Uji f …… 61
2. Uji t…… 62
3. Uji Koefisien Determinasi……. 63

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Estimasi dan Perhitungan Elastisitas …… 64
B. Uji Asumsi Klasik…….. 66
C. Hasil Uji Hipotesis…….. 70
D. Pembahasan Hasil Penelitian…… 72

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. PDRB Provinsi Lampung ADHK Tahun 2000…..... 6

2. PMA Lampung Tahun 2001-2015……..... 8

3. Diagram Ketenagakerjaan…….. 14

4. Kurva Backward Bending……... 22

5. Kerangka Pemikiran…… 52

6. Hasil Uji Normalitas……... 67

7. Hasil Uji Hipotesis …… 70

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung Tahun 2000-2015… 4
2. KHM, UMP Tahun 2001-2015 ……...…….…….. 9
3. Penelitian Terdahulu…… 49
4. Deskripsi Data …… 54
5. Hasil Uji Multikolinearitas…….. 66
6. Hasil Uji Heteroskedastisitas…….. 68
7. Hasil Uji Autokorelasi……. 69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Data Kesempatan Kerja, PDRB, PMA, UMP Tahun 2001-2015….. L1
2. Hasil Regresi ……. L2
3. Hasil Uji Multikolinearitas …… L3
4. Hasil Uji Heteroskedastisitas …… L4
5. Uji Autokorelasi …… L5
6. Hasil Uji Normalitas ……. L6
7. Hasil Hitung Rata-Rata KK, PDRB, PMA DAN UMP …… L7
8. Hasil Perhitungan Konsep Elastisitas …… L8
9. Tabel **t** …… L9
10. Tabel **f** …… L10

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dua indikator penting dalam pembangunan ekonomi bagi suatu negara terletak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja. Pendekatan pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan di beberapa daerah dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah yang diharapkan dapat membuka peluang kesempatan kerja lebih banyak. Landasan teoritis yang memperkuat argumen ini adalah model pertumbuhan Harrod-Domar yang didasarkan pada prinsip-prinsip neoklasik dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator adanya kenaikan tingkat kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja, Mulyadi (2002).

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, juga mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, dan menciptakan kesempatan kerja. Dengan adanya penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat, diharapkan pendapatan masyarakat akan turut meningkat. Pendapatan perkapita yang tinggi akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Sampai saat ini pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator keberhasilan dalam pembangunan, baik pembangunan nasional maupun regional, Soeroto (1992).

Menurut BPS (2015), Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Seperti Provinsi Lampung yang sebagai salah satu daerah yang pernah menjadi tujuan transmigrasi utama memiliki sumber daya manusia yang sangat majemuk. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan. BPS telah ditetapkan berdasarkan peraturan presiden nomor 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan peraturan kepala badan pusat statistik nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja badan pusat statistik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pada tahun 2015 jumlah penduduk mencapai 8.117.268 jiwa, usia kerja 5.701.857 jiwa, 3.832.108 angkatan kerja, 196.850 jiwa menganggur, serta 3.856.258 jiwa kesempatan kerja. Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung mencapai 237 jiwa per kilometer persegi, kepadatan penduduk di 15 kabupaten atau kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Bandar Lampung dengan kepadatan sebesar 3.371 jiwa per kilometer persegi dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 52 jiwa per kilometer persegi.

Kondisi tersebut tentu menjadi modal tersendiri bagi proses pembangunan yang dilakukan di Provinsi Lampung, mengingat kualitas dan efektifitas sumber daya manusia (SDM) mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Dalam hal ini gambaran atau profil SDM merupakan suatu informasi masukan untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi sebelumnya dan merencanakan tahap pembangunan selanjutnya.

Menurut BPS (2015), Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang sangat menonjol dalam proses pembangunan, hal ini disebabkan masalah ketenagakerjaan selalu mengetengahkan isu-isu tentang pengangguran, kesempatan kerja dan partisipasi angkatan kerja yang tentunya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja misalnya, akan memunculkan problematika sosial budaya berupa pengangguran, karena tidak semua tenaga kerja mampu diserap oleh pasar tenaga kerja. Meningkatnya angka pengangguran tentu akan berdampak kepada penurunan tingkat kesehjateraan rakyat. Sejalan dengan strategi pembangunan pemerintah pusat yang dititikberatkan pada tiga pendekatan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam penyajian data ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menggunakan batasan umur 15 tahun keatas dari semua penduduk dan dikenal dengan istilah penduduk usia kerja.

Berikut ini pada Tabel 1 digambarkan kondisi ketenagakerjaan di provinsi lampung di mulai tahun 2001-2015 mengenai jumlah penduduk, usia kerja, angkatan kerja, menganggur dan kesempatan kerja. Berdasarkan Tabel 1 dibawah ini pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2001 sebesar 29,35 persen dan pada tahun 2002 sebesar 30,68 persen dan terus meningkat setiap tahunnya, untuk kesempatan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 38,57 persen dan tahun 2015 sebesar 38,21 persen. Sepanjang periode hanya tahun 2013 yang mengalami penurunan sebesar 34,95 sedangkan pada tahun sebelumnya 2012 dan 2011 sebesar 35,37 persen dan 35,26 persen.

Tabel 1. Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung Tahun 2001-2015 (Juta Jiwa)

Tahun	Penduduk	Usia Kerja	Angkatan Kerja	Menganggur	Kesempatan Kerja (Persen)
2001	6.722.314	4.590.431	3.731.869	265.085	29,35
2002	6.787.654	4.643.848	3.932.932	265.085	30,68
2003	6.852.999	4.727.590	4.113.736	333.534	31,16
2004	6.915.950	4.808.534	4.303.123	355.740	31,79
2005	7.172.831	4.895.054	4.488.878	366.920	32,87
2006	7.260.588	4.950.973	4.587.186	375.325	32,72
2007	7.348.788	5.007.712	4.687.646	317.674	34,50
2008	7.437.414	5.248.138	3.568.770	255.167	34,68
2009	7.526.448	5.351.935	3.627.155	240.110	35,27
2010	7.608.405	5.367.848	3.686.346	224.094	38,57
2011	7.735.914	5.426.127	3.761.621	214.591	35,26
2012	7.835.308	5.523.672	3.632.415	215.841	35,37
2013	7.932.132	5.646.541	3.784.634	204.800	34,95
2014	8.026.191	5.692.746	3.758.725	211.745	36,11
2015	8.117.268	5.701.857	3.832.108	196.850	38,21

Sumber: BPS, 2015

Menurut kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus dalam Todaro (2004), berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja.

Menurut Sukirno (2004), Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi.

Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Secara sederhana bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja adalah pertumbuhan penduduk, peningkatan standar hidup, pertumbuhan ekonomi, perubahan investasi, penggunaan tenaga kerja dalam produksi. Kebutuhan tenaga kerja didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja di dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan, dengan demikian jumlah penduduk di Indonesia yang cukup besar dapat menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi, Depnakertrans (2004).

Berikut ini pada Gambar 1 data pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2001-2015. Pada keterangan Gambar 1 dibawah ini merupakan perubahan PDRB dalam setiap tahunnya yang terjadi peningkatan, di awali tahun 2001 PDRB sebesar Rp 94.633 milyar, tahun 2002 sebesar Rp 99.953 milyar tahun 2003 sebesar Rp 105.705 milyar dan terus meningkat lagi hingga tahun 2015 mencapai Rp 199.686 milyar, secara nominal angka PDRB tidak pernah mengalami penurunan untuk setiap tahunnya.

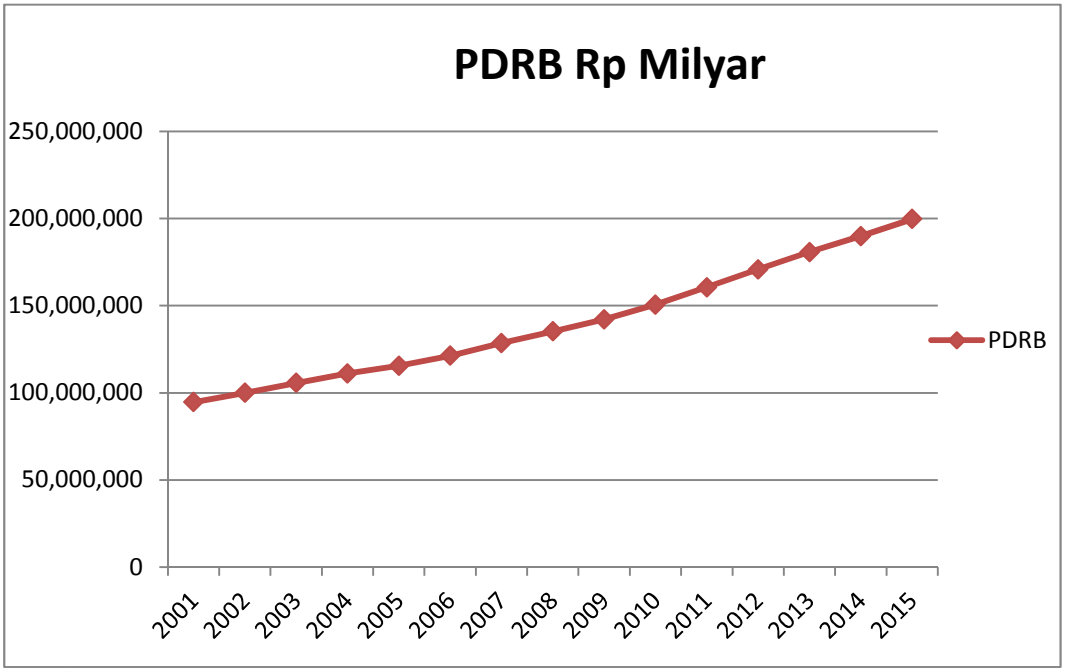

Sumber: BPS, 2015

Gambar 1. PDRB Provinsi Lampung ADHK Tahun 2000

Jika di hitung melalui tiga pendekatan, perubahan PDRB tersebut setiap periode terjadi kenaikan, ini mengindikasikan bahwa kegiatan produksi yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi salah satunya adalah faktor produksi yang terjadi di daerah tersebut meningkat begitu juga pendapatan yang diterima oleh pemerintah maupun masyarakat meninkat dan yang pada akhirnya pengeluaran konsumsi rumah tangga naik.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk domestik regional bruto di definisikan sebagai jumlah nilai tambah yang di hasilkan oleh seluruh unit produksi disuatu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

Oleh Karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Menurut Arsyad (1997), Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan produk domestik bruto atau pendapatan nasional bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada dua tujuan utama yang ingin dicapai yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada. Menurut Tambunan (2001), Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan atau meningkatkan permintaan di pasar. Menurut Deliarnov (1995), Investasi asing di Indonesia ada dua bentuk investasi yaitu portofolio dan investasi langsung *(Foreign Direct Investment).* Konsep Penanaman Modal Asing *(FDI)* sebenarnya masih belum ada acuan yang baku, namun demikian studi literatur maupun kajian empiris yang pernah dilakukan dapat dipakai sebagai rujukan konsep tersebut. Menurut Krugman (1991), Yang dimaksud dengan *FDI* adalah arus modal

internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain.

Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Berikut pada Gambar 2, perkembangan PMA di Provinsi Lampung tahun 2001-2015.

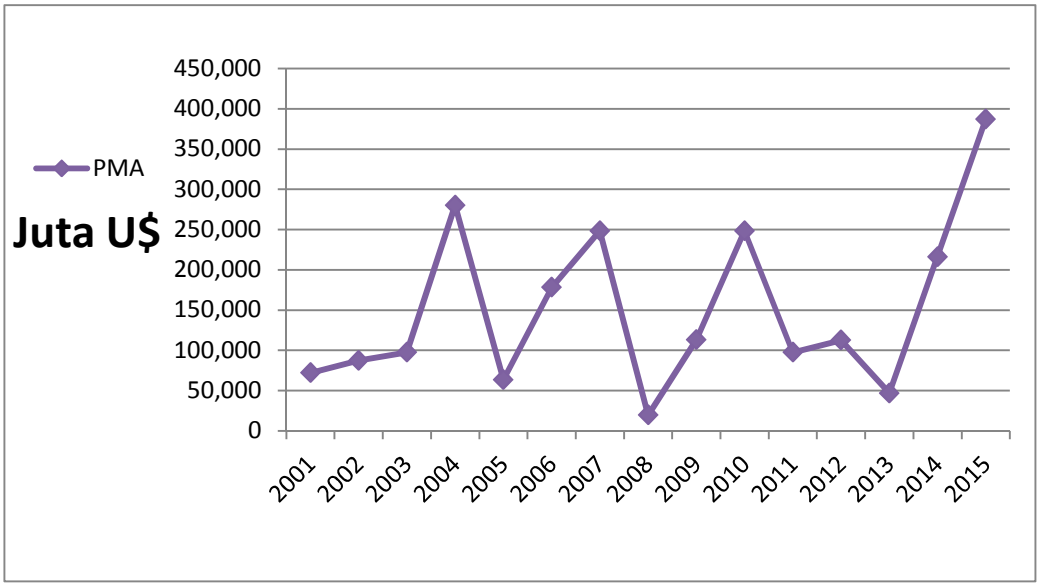

Sumber: BPMD, 2015
Gambar 2. PMA Lampung

Nilai realisasi PMA di Provinsi Lampung yang bergerak secara fluktuatif, di mulai pada tahun 2001 sebesar 72,125 juta U$, tahun 2002 pertumbuhan investasi asing mengalami peningkatan sebesar 87,390 dan mengalami peningkatan lagi tahun 2003 sebesar 97,440 juta U$. Penurunan investasi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 19,557 juta U$. Perkembangan nilai realisasi PMA tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 386,795 juta U$. Menuru Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPMI) pada tahun 2014, PMA terbesar terhadap sektor pertambangan sebesar 1,165 juta U$ dengan jumlah proyek mencapai 232. Untuk Provinsi Lampung investasi PMA sebesar 216,207 juta U$ dengan jumlah proyek mencapai 34. Untuk besaran seluruh investasi

PMA di Indonesia pada tahun 2014 di sumbang oleh Negara Singapura sebesar 2,054 milyar U$, lalu disusul oleh Negara Japan dengan nilai investasi sebesar 1,4 miliar U$.Teori Harrod-Domar dikenal sebagai teori pertumbuhan, menurut teori ini dalam Mulyadi (2002), investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Peran modal fisik di dalam model pertumbuhan sangat penting, akan tetapi kapasitas produksi hanya dapat meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Proses produksi tersebut memerlukan unsur faktor produksi untuk mrngolah dan menghasilkan barang dan jasa yang akan di jual di pasar, besarannya tergantung dari permintaan barang dan jasa yang dihasilkan tersebut. Dalam proses tersebut faktor produksi menerima pendapatan yaitu upah yang sama dengan nilai produksi yang dihasilkan. Berikut ini tersaji kondisi gambaran keadaan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup minimum dan di terbitkan melalui surat keputusan Gubernur di Provinsi Lampung.

Tabel 2: KHM, UMP Tahun 2001-2015

Tahun	KHM(Rp Ribu)	UMP(Rp Ribu)
2001	220	240
2002	325	310
2003	403	350
2004	377	377
2005	396	405
2006	589	505
2007	554	555
2008	650	617
2009	805	619
2010	861	767
2011	897	855
2012	1.008	975
2013	1.060	1.150
2014	1.399	1.399
2015	1.440	1.581

Sumber: BPS, 2015

Berdasarkan Tabel 2 dapat di ambil informasi, kebutuhan hidup minimum di Provinsi Lampung mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Tahun 2001 angka kebuutuhan hidup minimum (KHM) sebesar Rp 220.765 di atas upah minimum Provinsi yakni sebesar Rp 192.000, di ikuti tahun berikutnya 2002 KHM sebesar Rp 235 dengan UMP Rp310.000, tentu angka tersebut baik itu UMP maupun KHM akan mengalami kenaikan seiring berjalannya tahun karena UMP akan mengikuti KHM. Pemerintah selaku pengambil keputusan tentu wajib melindungi hak-hak para pekerja salah satunya kebijakan mengenai UMP, dan UMP dibentuk melalui dewan pengupahan Provinsi, serikat buruh dan juga Gubernur seperti yang tertera pada Tabel 2 gubernur menerbitkan surat keputusan (SK) setiap terjadi perubahan UMP.

Menurut Utami (2009), Kebijakan upah minimum ini sering dikritik oleh para pengusaha karena para pengusaha menganggap bahwa penetapan upah minimum dilihat sebagai pertambahan biaya produksi yang penyelesaiannya para pengusaha memutuskan untuk menaikkan harga jual produk yang diproduksi untuk menjamin kelangsungan usahanya dan kemungkinan yang terjadi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja, maka akan lebih banyak terjadi lagi pengangguran. Jika kenaikan upah bisa meningatkan kesehjateraan pekerja tetapi justru kenaikan upah yang tinggi dan tidak dibarengi dengan produktivitas maka perusahaan akan mengalami kerugian karena dalam jumlah produksi hanya sedikit permintaan terhadap barang dan jasa yang di produksi. Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh PDRB, PMA, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Lampung”**

B. Rumusan Masalah

Secara umum permasalahan yang hendak akan dikaji dalam penelitian ini adalah hubungan antara pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, dan upah minimum provinsi serta kesempatan kerja. Secara khusus permasalahan yang diungkapkan diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kesempatan kerja di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pengaruh PMA terhadap kesempatan kerja di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap kesempatan kerja di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap kesempatan kerja di Provinsi Lampung.
2. Menganalisis pengaruh PMA terhadap kesempatan kerja di Provinsi Lampung.
3. Menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap kesempatan kerja di Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi.
2. Manfaat Teoritis

   Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah manfaat ilmu pengetahuan dibidang ekonomi pembangunan khususnya masalah kesempatan kerja.
3. Manfaat Praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat membantu pemerintah selaku pengambil kebijakan *(policy maker)* di daerah Provinsi Lampung untuk dapat mencipatakan kesempatan kerja di wilayah Lampung.
4. Peneliti

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti lain yang sejenis.

II. LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Ketenagakerjaan

1. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tercantum dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 menyebutkan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut badan pusat statistik, tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun atau lebih, dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih, sedangkan penduduk berumur dibawah 15 tahun digolongkan bukan tenaga kerja.

Menurut Simanjuntak (2001), Pasar tenaga kerja dapat digolongkan menjadi pasar tenaga kerja terdidik dan pasar tenaga kerja tidak terdidik, kedua bentuk pasar tenaga kerja tersebut berbeda dalam beberapa hal. *Pertama*, tenaga terdidik pada umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi dari pada yang tidak terdidik. Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah dan penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya.

Kedua, dari segi waktu, *supply* tenaga kerja terdidik haruslah melalui proses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, elastisitas *supply* tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil dari pada elastisitas *supply* tenaga kerja tidak terdidik. *Ketiga*, dalam proses pengisian lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenaga kerja terdidik dari pada tenaga kerja tidak terdidik. Menurut Simanjuntak (2001), diagram ketenagakerjaan memiliki komposisi sebagai berikut:

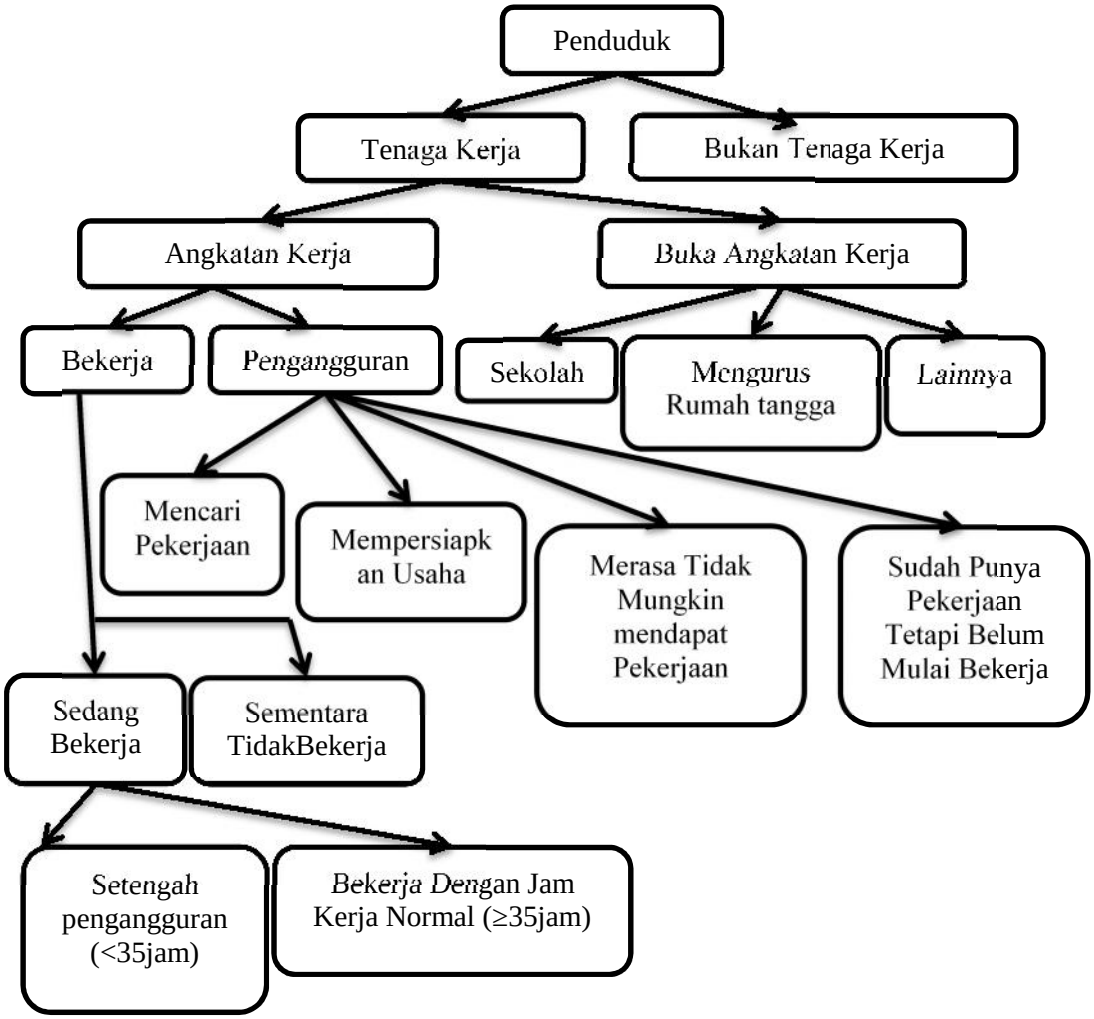

Gambar 3. Diagram Ketenagakerjaan
Sumber: Simanjuntak, (2001)

2. Menurut Depnakertrans (2014), Kualitas tenaga kerja dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

b. Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

3. Klasifikasi Tenaga Kerja Menurut BPS (2014)

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu alasan. Angkatan kerja terdiri dari pengangguran dan penduduk bekerja. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang

mempersiapkan usaha atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja. Penganggur dengan konsep ini biasanya disebut dengan penganggur terbuka. Sedangkan penduduk bekerja didefinisikan sebagai penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja). Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambahnya lapangan kerja yang tersedia maka semakin meningkatnya total produksi suatu negara, dimana salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan.

TPAK dapat dinyatakan untuk seluruh tenaga kerja yang ada atau jumlah tenaga kerja menurut kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun desa-kota. TPAK dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja *(labour supply)* yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Secara umum, TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang

menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Usia Kerja}} \times 100\%$$

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan *potential labor force.*

B. Teori Ketenagakerjaan

a. Teori Klasik Adam Smith

Adam smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonom yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi.

Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia

yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi, Mulyadi (2002).

b. Teori Malthus

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Thomas Robert Malthus mengungkapkan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung. Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunnya produksi perkepala dan satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut adalah melakukan kontrol atau pengawasan pertumbuhan penduduk, Mulyadi (2002).

c. Teori Keynes

John Maynard Keynes berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja akan mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Kemungkinan tingkat upah diturunkan dinilai kecil sekali oleh Keynes. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunya harga-harga, Mulyadi (2002).

d. Teori Harrod Domar

Teori Harrod Domar dikenal sebagai teori pertumbuhan, menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi, dalam Mulyadi (2002).

e. Teori Klasik J.B Say

Jean Baptise Say, Mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri *(supply creates its own demand)*. Pendapat say ini disebut Hukum Say (*Say's Law*). Hukum say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Tiap ada produksi akan ada pendapatan, yang besarnya sama dengan nilai produksi. Dengan demikian, dalam keseimbangan, produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi barang yang bersangkutan. Berdasarkan asumsi seperti ini ia menanggap bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya akan diiringi pula oleh peningkatan permintaan.

C. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

a. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan sebuah daftar berbagai alternatif kombinasi tenaga kerja dengan input lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan

tingkat upah, Ananta (1990). Permintaan produsen atas tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu memberikan nikmat *(utility)* kepada si pembeli, sedangkan pengusaha memperkerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang di produksinya. Permintaan akan tenaga kerja seperti itu disebut *derived demand*, Simanjuntak (2001). Pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu.

Faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja menurut Sumarsono (2009), Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau diserap oleh perusahaan atau instansi tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan harga perunit yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang yaitu dengan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali.

b. Penawaran Tenaga Kerja

Dapat didefenisikan penawaran tenaga kerja mencakup semua orang yang mempunyai pekerjaan ditambah jumlah mereka yang secara aktif mencari pekerjaan. Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara

tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Penawaran kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang apakah dia mau bekerja atau tidak. Keputusan ini tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah digunkan untuk kegiatan lain yang sifatnya lebih santai (konsumtif), atau kombinasi keduanya.

Apabila dikaitkan dengan tingkat upah, maka keputusan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Apabila penghasilan tenaga kerja relatif sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja. Apabila penghasilan tenaga kerja relatif sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja. Pada keterangan gambar 4 mengenai kurva backward bending tentang upah, jika upah riil meningkat dari W1 ke W2 kemudian karena penghasilan yang lebih tinggi individu akan memiliki utilitas yang lebih besar, maka mereka akan bersedia untuk meningkatkan jam kerja per tahun untuk L2.

Selama bagian ini kurva efek substitusi adalah positif, efek pendapatan negatif, tetapi efek substitusi lebih besar dari pada efek pendapatan. Oleh karena itu, kenaikan tingkat upah riil akan menyebabkan peningkatkan jumlah jam kerja. Namun, jika upah riil meningkat dari W2 ke W3, maka jumlah jam kerja per tahun akan jatuh dari L2 ke L3. Oleh karena itu, efek pendapatan akan berarti bahwa seseorang individu akan bekerja dengan waktu yang lebih sedikit. Namun, efek subtitusi adalah bahwa upah lebih tinggi akan berarti utilitas yang diperoleh dari kerja jam terakhir lebih

besar dari pada utilitas yang diperoleh dari satu jam waktu luang. Hal ini karena upah yang lebih tinggi berarti seseorang dapat membeli lebih banyak barang.

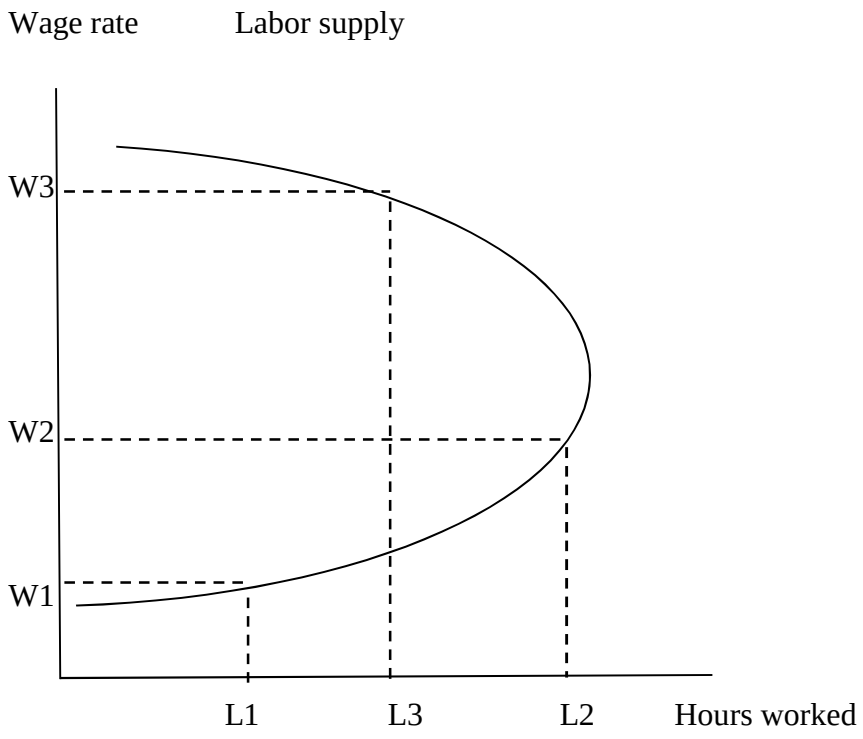

Gambar 4. Kurva Backward Bending
Sumber: Rosyidi, (2000)

Akibatnya, individu akan bekerja sebagai pengganti dari waktu luang sampai utilitas yang sama (yaitu konsumen kembali dalam keseimbangan antara pekerjaan dan waktu senggang). Isu yang menarik adalah bahwa individu memiliki karakteristik utilitas yang berbeda. Maka tingkat *trade off* antara utilitas dari satu jam bekerja dan utilitas dari satu jam bersantai akan berbeda. Hal tersebut menyebabkan bentuk dari kurva penawaran membelok ke kiri yang dikenal dengan *backward bending supply curve* Sumarsono, (2009).

D. Kesempatan Kerja

a. Kesempatan Kerja

Satu aspek dalam kinerja ekonomi adalah sejauh mana suatu perekonomian menggunakan sumber daya dengan baik. Karena para pekerja adalah sumber daya utamanya, untuk menjaga agar para pekerja tetap bekerja menjadi puncak perhatian para pembuat kebijakan ekonomi. Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian kesempatan yang tersedia sebagai akibat dari kegiatan ekonomi atau memproduksi barang dan jasa Mankiw (2006).

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Dengan kata lain, kesempatan kerja disini tidak menunjukkan pada potensi tetapi pada fakta jumlah orang yang bekerja.

Menurut Sukirno (2004), suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau kesempatan kerja penuh apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari empat persen. Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam proses produksi yang lain seperti tanah, modal, dan lain-lain, maka manusia merupakan penggerak bagi seluruh faktor-faktor produksi tersebut.

Pada suatu daerah di mana tingkat kesempatan kerjanya tinggi, hal tersebut akan mengurangi tingkat pengangguran dan sebaliknya jika kesempatan kerja itu rendah

maka pengangguran akan meningkat. Tinggi rendahnya tingkat kesempatan kerja dipengaruhi oleh beberapa komponen pokok, komponen tersebut di suatu negara jenisnya berbeda-beda. Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah terisi, dari lapangan pekerjaan yang terisi tersebut yang mengandung arti adanya kesempatan, kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja nyata-nyata diperlukan oleh perusahaan untuk menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu. Data kesempatan kerja diperoleh untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa jumlah kesempatan kerja didekati melalui banyaknya lapangan kerja yang terisi yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja Depnakertrans (2004). Jadi pengertian kesempatan kerja yaitu suatu keadaan yang mencerminkan sampai jumlah berapa dari total angkatan kerja yang dapat diserap dapat ikut serta aktif dalam suatu kegiatan perekonomian suatu negara. Dengan kata lain kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja atau telah mendapatkan pekerjaan.

b. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja

Menurut Simanjuntak (2001), Faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja yaitu:

1. Kondisi Perekonomian

Pesatnya roda perekonomian suatu daerah mencerminkan aktivitas produksi yang tinggi, kapasitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi diantaranya adalah tenaga kerja. Jadi banyak perusahaan yang menambah tenaga kerja baru. Menurut Suparmoko (2002), pertumbuahn ekonomi berkaitan erat dengan

produksi, artinya makin banyak barang atau jasa yang diproduksi akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Di sisi lain, terdapat hubungan fungsional antara jumlah barang atau jasa yang diproduksi dengan tenaga kerja. Artinya, setiap perubahan dalam jumlah produksi akan mengubah kuantitas tenaga kerja yang diperlukan. Karena perubahan dalam jumlah produksi barang dan jasa mecerminkan pertumbuhan ekonomi, maka tenaga kerja yang terserap dalam proses produksi barang dan jasa berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi.

2. Modal

Pertumbuhan ekonomi memerlukan unsur investasi. Secara teori, investasi yang masuk ke suatu daerah berarti menambah kapital dalam kegiatan perekonomian. Penambahan kapital ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, jika arus investasi ke suatu daerah berlangsung terus menerus dan dalam jangka panjang serta dibarengi dengan ekonomi yang berdaya saing tinggi, maka investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang ada.

Selanjutnya, peningkatan stok kapital ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan produksi yang menambah aktivitas perekonomian daerah tersebut. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa kapital akan meningkatkan produktivitas perekonomian wilayah. Kondisi yang demikian didukung pendapat Todaro (2000), bahwa pertumbuhan ekonomi negara atau wilayah sangat tergantung dari tingkat akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang dialokasikan dalam perekonomian. Artinya semakin tinggi

akumulasi kapital maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

3. Pertumbuhan Penduduk

Kemajuan teknologi, pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan produktivitas mereka juga dapat menambah produksi barang dan jasa. Menurut Kuncoro (2000), Menyatakan bahwa faktor tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting guna meningkatkan pendapatan perkapita. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi, maka *output* hasil produksi juga akan mengalami peningkatan. Tetapi hal tersebut hanya berlaku sampai titik tertentu karena dibatasi oleh *The Law of Diminishing Return* atau Hukum Hasil Yang Semakin Menurun.

4. Tingkat Teknologi

Teknologi merupakan cara mengolah atau menghasilkan barang dan jasa tertentu agar memiliki nilai tambah. Teknologi mempunyai hubungan dengan inovasi, yaitu penemuan baru yang telah diterapkan dalam proses produksi, seperti menemukan daerah pemasaran baru, menemukan komoditi baru, menemukan cara produksi baru, dan sebagainya.

5. Tingkat Upah

Upah merupakan pendapatan yang diterima langsung oleh tenaga kerja sebagai akibat kegiatan proses produksi. Kenaikan upah yang tidak dibarengi dengan kenaikan kapasitas produksi akan menyebabkan pihak perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya, hal tersebut akan menurunkan tingkat kesempatan kerja.

c. Terbentuknya Kesempatan Kerja

Menurut Sukirno (2004), tingkat perkembangan PDRB sebagai ukuran kesuksessan suatu daerah untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Todaro (2004), menyatakan pertumbuhan ekonomi akan menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran. Adanya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh perkembangan dari PDRB di berbagai sektor menyebabkan terbukanya kesempatan kerja, sehingga memungkinkan bertambahnya permintaan terhadap tenaga kerja, walaupun seringkali peningkatan kesempatan kerja ini tidak sebanding dengan tenaga kerja yang tersedia sehingga menyebabkan masalah ketenagakerjaan.

Todaro (2004), menyatakan bahwa investasi memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja. Prasetyo (2009), semua ahli ekonomi menyatakan bahwa investasi dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal asing ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mulyadi (2002), dalam teori Harrod Domar menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar produksi

E. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Widodo (2006), Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun dan mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau atau antar Provinsi.

Menurut Aryanto (2011), yang lebih relevan untuk digunakan adalah nilai PDRB berdasar harga konstan dari pada PDRB atas dasar harga berlaku. Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2014), yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi disuatu wilayah.

PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi diwilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokan dalam 9 lapangan usaha (sektor) yaitu pertanian meliputi (peternakan, kehutanan dan perikanan), pertambangan dan penggalian, idustri pengolahan, listrik gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan real estate dan jasa perusahaan, jasa-jasa termasuk jasa pemerintah.

2. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto.

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat Sukirno (2000). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat.

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka. Menurut Arsyad (1997), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

F. Hubungan PDRB Dengan Kesempatan Kerja

Berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2009), hasil analisis menunjukan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja. Sedangkan menurut Lestari (2005) perluasan kesempatan kerja tidak hanya dipengaruhi oleh PDRB semata, namun faktor pertumbuhan ekonomi cukup signifikan dan harus diperhatikan agar tercapai sasaran perluasan kesempatan kerja. PDRB bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan dapat diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan.

G. INVESTASI

1. Teori Investasi

Pada model Harrod-Domar dalam Mulyadi (2002), peranan investasi sangat penting dalam jangka panjang investasi mempunyai pengaruh ganda. Di satu sisi investasi mempengaruhi permintaan agregat di sisi lain investasi juga mempengaruhi kapasitas produksi nasional dengan menambahkan stok modal yang tersedia. Harrod Domar menyimpulkan agar suatu ekonomi nasional selalu tumbuh dengan kapasitas produksi penuh yang disebutnya sebagai pertumbuhan ekonomi yang mantap *(steady-state growth),* efek permintaan yang ditimbulkan dari penambahan investasi harus selalu diimbangi oleh efek penawarannya tanpa terkecuali. Menurut Harrod-Domar investasi memberikan peranan kunci dalam prosers pertumbuhan yang disebabkan karena:

a. Investasi dapat menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari penawaran.
b. Investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal yang merupakan dampak dari penawaran.

Menurut Tambunan (2001), Investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi pertambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya.

Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Sodik dan Didi (2005), menyatakan investasi telah disepakati menjadi salah satu kata kunci dalam penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan.

2. Jenis Investasi

Menurut Rosyidi (2000), Jenis-jenis investasi dikelompokan menjadi 4 kelompok antara lain:

1. Berdasarkan pada unsur pendapatan nasional

a. *Autonomos investment* (Investasi Otonom), merupakan investasi yang perubahanya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, dalam hal ini pendapatan nasional.

b. *Induced investment* (Investasi terimbas) adalah investasi yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional.

2. Berdasarkan subjeknya

a. *Public investment* (Investasi pemerintah), merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat.

b. *Private Investment* (Investasi swasta), merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

3. Berdasarkan Alasannya

a. *Domestic investment* (Investasi dalam negeri), merupakan penanaman modal didalam negeri, artinya penanaman modal dari negeri sendiri yang berinvestasi di dalam negeri.

b. *Foreign invesment* (Investasi asing), yaitu penanaman modal asing yang artinya investasi yang diperoleh dari luar negeri untuk digunakan didalam negeri guna mengoptimalkan sumber-sumber daya yang masih belum termanfaatkan.

4. Berdasarkan unsur pembentukanya

a. *Gross investment* (Investasi bruto), merupakan total dari seluruh investasi yang dilakukan oleh suatu negara pada suatu ketika atau pada waktu tertentu.

b. *Net invesment* (Investasi neto), merupakan hasil dari investasi bruto yang dikurangi dengan penyusutan (*depreciation*) atau disebut investasi bersih.

3. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penggairahan iklim investasi di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkan undang-undang republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 dalam pasal 1 Ayat 9 tentang penanaman modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

1. Pengertian modal asing yaitu alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

4. Manfaat Penanaman Modal Asing

a. Investasi asing membawa teknologi yang lebih mutakhir. Besar kecilnya keuntungan bagi negara tujuan tergantung pada kemungkinan penyebaran teknologi yang bebas bagi perusahaan.
b. Investasi asing meningkatkan kompetisi di negara tujuan. Masuknya perusahaan baru dalam sektor yang tidak diperdagangkan (*non tradable sector*) meningkatkan

output industri dan menurunkan harga domestik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.

c. Investasi asing dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan nilai tukar dengan negara tujuan (*investment gap*).

5. Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Asing di Indonesia

Menurut Deliarnov (1995), Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi yaitu:

a. Portofolio

Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi.

Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru. Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru, hal ini berarti pula membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar hutang bank. Selain itu, dalam proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen.

b. Langsung

Investasi langsung atau disebut juga dengan penanaman modal asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman modal asing atau *Foreign direct investment*

(FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen atau jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.

6. Hubungan Investasi dengan Kesempatan Kerja

Berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safina dan Endang (2011), hasil analisis menunjukan PMA berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja. Menurut Nopirin (2000), faktor yang mempengaruhi investasi diantaranya adalah tingkat bunga, penyusutan, kebijaksanaan pemerintah, perkiraan tentang penjualan dan kebijaksanaan ekonomi.

Tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh besaranya pengeluaran agregat yang wujud dalam perekonomian. Dalam perekonomian pengeluaran agregat itu terdiri dari empat jenis pengeluaran yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi oleh perusahaan perusahaan, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi adalah ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan dari masing-masing atau gabungan faktor-faktor tersebut. Dengan kata, lain semua fluktuasi di sektor lain seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat harga, tingkat konsumsi dan investasi merupakan hasil reaksi dari individu-individu terhadap perubahan dalam perekonomian. Adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran.

Harrod-Domar dalam Mulyadi (2002), dalam teorinya menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar produksi. Kapasitas produksi yang membesar tersebut tentunya membutuhkan tenaga kerja yang besar pula, di mana dalam kondisi yang seperti ini diasumsikan tenaga kerja meningkat secara geometris dan selalu *full employment*.

Menurut Teori Solow dalam Mudrajad (2002), Menjelaskan bahwa angkatan kerja diasumsikan tumbuh secara geometris dan *full employment* selalu tercapai. Artinya bahwa pertumbuhan investasi yang ditanamkan akan diikuti dengan pertumbuhan kesempatan kerja.

Menurut Mankiw (2000), menjelaskan bahwa tiga jenis pengeluaran investasi, yaitu investasi tetap bisnis (*business fixed investment*), investasi residensial (*residensial investment*), investasi persediaan (*inventory investment*). Investasi tetap bisnis mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk produksi. Model investasi tetap bisnis standar disebut juga model investasi neo klasik. Model ini mengkaji tentang manfaat dan biaya bagi perusahaan untuk memiliki barang-barang modal. Model ini menunjukkan bagaimana tingkat investasi dikaitkan pada produk modal dan tingkat bunga yang mempengaruhi perusahaan.

H. Teori Upah

Menurut Mankiw (2001), Teori upah efisiensi *(Efficiency Wage)* merupakan teori yang menghubungkan antara produktivitas atau efisiensi pekerja dengan upah yang mereka terima. Teori ini menyatakan bahwa upah tinggi membuat pekerja lebih

produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu akan juga menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah efisiensi pertama menyatakan upah mempengaruhi kesehatan, teori upah efisiensi kedua menyatakan upah tinggi mengurangi perputaran tenaga kerja, teori upah efisiensi ketiga menyatakan kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar ke karyawannya, teori upah efisiensi keempat menyatakan upah tinggi memperbaiki upaya pekerja.

Teori Arthur Lewis dalam Jhingan (2010), memiliki asumsi-asumsi yaitu perekonomian suatu negara terbagi menjadi dua sektor. *Pertama*, sektor tradisional yaitu sektor pertanian subsisten yang surplus tenaga kerja, dan tingkat upah yang rendah. *Kedua*, sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dengan upah yang lebih tinggi pula, dan menjadi penampung transfer tenaga kerja dari sektor tradisional.

Perbedaan tingkat upah tenaga kerja pada kedua sektor ini akan menarik banyak tenaga kerja untuk berpindah (migrasi) dari sektor pertanian ke sektor industri. Produktivitas marjinal tenaga kerja di sektor industri lebih tinggi dari upah yang mereka terima, sehingga mengakibatkan terbentuknya surplus sektor industri. Surplus sektor industri dari selisih upah ini diinvestasikan kembali seluruhnya dan tingkat upah di sektor industri diasumsikan konstan serta jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah di sektor pertanian. Proses transfer tenaga kerja tersebut selanjutnya ditentukan oleh tingkat investasi dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor industri.

Pasar tenaga kerja, sama halnya dengan pasar-pasar lainnya dalam perekonomian diatur oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran Ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah Mankiw (2003). Menurut Ricardo dalam Deliarnov (1995), nilai tukar suatu barang ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya untuk bertahan hidup atau subsisten bagi buruh yang bersangkutan. Upah sebesar ini disebut sebagai upah alami (*natural wage*). Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat.

Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar hidup masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja atau upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium , secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa Mankiw, (2001).

a. Pembentukan Upah

Menurut pasal 1 angka 1 peraturan menteri tenaga kerja, tahun 1999 tentang upah minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam pasal 97 undang-undang nomor 13 tahun 2003 menentukan bahwa pemerintah dalam hal ini gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi dan atau bupati walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan penetapan upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja atau buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan peraturan pemerintah. Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan menteri tenaga kerja. Penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan beberapa hal secara komprehensif.

Dasar pertimbangan menurut pasal 6 peraturan menteri tenaga kerja republik Indonesia nomor 1 tahun 1999 sebagai berikut:

1. Kebutuhan hidup minimum (KHM)
2. Indeks harga konsumen (IHK)
3. Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan
4. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah
5. Kondisi pasar kerja
6. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

b. Mekanisme Pembentukan UMP

Upah Minimum Provinsi adalah upah yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu Provinsi. Dahulu upah minimum Provinsi dikenal dengan istilah upah minimum regional tingkat I.

Dasar hukum penetapan UMP adalah peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan Provinsi.

1. Ketua dewan pengupahan Provinsi dan atau Kabupaten Kota membentuk tim survey yang anggotanya terdiri dari unsur perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi.
2. Standar KHL ditetapkan dalam kepmen nomor 13 tahun 2012, berdasarkan standar tersebut, tim survey dewan pengupahan melakukan survey harga untuk menentukan nilai harga KHL yang nantinya akan diserahkan kepada gubernur Provinsi masing-masing.
3. Survey dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan januari sampai dengan september, sedangkan untuk bulan oktober sampai dengan desember dilakukan prediksi dengan membuat metode *least square*. Hasil survey tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL.
4. Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.
5. Berdasarkan nilai harga survey tersebut, dewan pengupahan juga mempertimbangkan faktor lain seperti produktivitas, pertumbuhan ekonomi,

usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran atau pertimbangan dari dewan pengupahan Provinsi dan atau Kabupaten Kota.

6. Gubernur nantinya akan menetapkan besaran nilai upah minimum, penetapan ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 januari.

Terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketetapan upah minimum, keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia nomor 226 tahun 2000 juga mengaturnya di dalam pasal 19 ayat 2 yang menentukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan kepada gubernur melalui kepala kantor wilayah departemen tenaga kerja atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan di Provinsi.

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum dimaksud di atas tidaklah serta merta dapat disetujui oleh gubernur. Di dalam pasal 20 ayat 2 keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia nomor 226 tahun 2000 dinyatakan bahwa berdasarkan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum, gubernur dapat meminta akuntan publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan atas biaya perusahaan yang memohon penangguhan. Selanjutnya gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum berdasarkan audit dari akuntan publik.

Apabila permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum disetujui oleh gubernur, maka persetujuan tersebut berlaku untuk waktu paling lama 1 tahun atau

dengan kata lain, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan yang tata caranya diatur dengan keputusan Menaker. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Bila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

c. Tinjauan Umum Mengenai Upah

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat dari suatu perbuatan, resiko, Kamus Bahasa Indonesia (2002). Menurut pasal 1 angka 30 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

d. Jenis Jenis Upah

Menurut kemenakertrans dalam kepustakaan hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Upah Nominal

   Adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja atau buruh yang berhak, sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2. Upah Rill
3. Adalah upah nyata yang benar-benar harus diterima seorang pekerja atau buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari:

   a. besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima

   b. besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

4. Upah Minimum

   Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah yakni gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi dan atau bupati atau walikota, dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum, yaitu:

   a. Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja atau buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja.

   b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materil kurang memuaskan.

c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
d. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.

Menurut Iksan (2010), Masalah dalam penetapan UMP adalah pada metode perhitungannya. Ada perbedaan nyata dari produktivitas antar sektor. Sektor-sektor yang menggunakan buruh terdidik umumnya telah membayar upah jauh di atas upah minimum karena hal ini mencerminkan produktivitas, tetapi banyak sektor lain yang produktivitasnya ada di bawah upah minimum sehingga kebijakan upah minimum akan memukul sektor ini yang umumnya sektor padat karya.

Menurut Susilawati (2012), Peraturan upah minimum membatasi peluang kerja bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian. Pihak perusahaan ternyata kemudian menaikkan keahlian atau ketrampilan dan semakin padat modal selama memungkinkan mereka lebih mengintensifkan pemakaian modal dari pada tenaga kerja. Disamping itu, adanya peraturan upah minimum justru terkadang membatalkan niat perusahaan merekrut pekerja non ahli dan membekalinya dengan pelatihan kerja atau ketrampilan khusus. Tujuan pengaturan upah tersebut adalah:

1. Menjaga agar tingkat upah tidak merosot dan berfungsi sebagai jaring pengaman.
2. Meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah.

3. Mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah dengan demikian pengaturan upah yang dilakukan oleh pemerintah hanya berlaku bagi pekerja dengan golongan terendah.

e. Hubungan Upah Minimum Dengan Kesempatan Kerja

Kenaikan biaya perusahaan dalam pasar kompetitif akan menyebabkan harga barang yang diproduksi meningkat, dan orang akan mengurangi pembelian mereka terhadap barang tersebut. Konsekuensinya, perusahaan akan mengurangi tingkat produksi karena output yang diproduksi berkurang, maka efek output akan menyebabkan permintaan tenaga kerja dan kesempatan kerja berkurang Nicholson (2002).

Menurut Mankiw (2001), Walupun bukan penyebab utama pengangguran dalam perekonomian, upah minimum memiliki dampak yang penting tehadap kelompok-kelompok tertentu yang memiliki tingkat pengangguran tinggi. Selain itu, analisis upah minimum akan menjadi awal yang baik karena, seperti yang akan kita lihat, analisis ini dapat digunakan untuk memahami sejumlah penyebab pengangguran struktural.

Ketika peraturan upah minimum memaksa upah tetap berada di atas tingkat yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran, maka akan menurunkan kuantitas tenaga kerja yang di minta. Terjadilah kelebihan jumlah pekerja karena lebih banyak pekerja yang mau bekerja di banding jumlah pekerjaan yang tersedia sejumlah pekerja terpaksa menanggur. Peraturan upah minimum umumnya terkait dengan

pekerja-pekerja yang paling tidak ahli dan tidak berpegalaman seperti remaja. Hanya pengangguran di kalangan para pekerja semacam ini yang bisa dijelaskan oleh peraturan upah minimum.

Berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suharyadi (2002), menunjukkan dengan jelas bahwa upah minimum menguntungkan sebagian pekerja dan merugikan sebagian yang lain. Para pekerja yang mampu mempertahankan pekerjaan mereka tentu mendapat keuntungan dari kenaikan upah minimum. Dalam hal kesempatan kerja, pekerja kerah putih adalah kelompok pekerja yang sangat diuntungkan oleh penegakan kebijakan upah minimum. Akan tetapi, kelompok pekerja yang kehilangan pekerjaan karena adanya peningkatan upah minimum adalah yang dirugikan oleh kebijakan upah minimum. Mereka yang potensial terpukul oleh kebijakan upah minimum adalah para pekerja yang sangat rentan terhadap perubahan-perubahan dalam pasar tenaga kerja, yaitu pekerja perempuan, usia muda, dan mereka yang berpendidikan rendah.

Menurut Gindling dan Katherine dalam Susilawati (2012), yang menemukan bahwa pertama, upah minimum legal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap upah pekerja di *covered sector* (sektor formal), namun tidak berpengaruh terhadap upah pekerja di *uncovered sector* (sektor informal). Kenaikan 10% pada upah minimum legal akan menaikkan upah rata-rata di *covered sector* sekitar 1%. Kedua, upah minimum yang legal mempunyai efek yang negatif signifikan dimana kenaikan upah minimum menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja di *covered sector*. Diperkirakan bahwa kenaikan 10 persen dalam upah minimum akan mengurangi

kesempatan kerja sebesar 1,09 persen. Ketiga, upah minimum memiliki efek negatif terhadap dimensi lain dari the *covered sector* yaitu jam kerja, dimana kenaikan 10 persen dalam upah minimum riil menyebabkan penurunan 0,62 persen pada rata-rata jumlah jam kerja. Keempat dampak upah minimum terhadap pekerja pada berbagai bidang keahlian menunjukkan bahwa upah minimum memiliki dampak terbesar pada pekerja dengan distribusi pendapatan terbawah dari distribusi pekerja menurut keahlian. Kebijakan upah minimum yang diterapkan secara ketat akan membantu para pekerja yang lebih produktif yang mampu mempertahankan pekerjaan mereka di sektor modern. Tetapi bagi para pekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan kemungkinannya kecil.

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kelompok miskin sebagian besar ditemukan di antara mereka yang bekerja di sektor informal perkotaan dan sektor perdesaan. Jika kebijakan upah minimum mengurangi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor modern hingga di bawah pertumbuhan angkatan kerja, maka akan semakin banyak pekerja berketerampilan rendah yang mungkin terpaksa mengambil pekerjaan dengan kualitas pekerjaan dan upah yang lebih rendah di sektor informal. Sebaliknya temuan studi ini tidak mendukung studi Knight, John, Deng Quheng dan Li Shi (2011), yang menemukan bahwa surplus tenaga kerja di pedesaan China ternyata tidak selalu mengalir ke perkotaan, seperti pada model Lewis, walaupun sudah ada kenaikan upah bagi pekerja migran. Ada kecenderungan bahwa tenaga kerja di pedesaan enggan untuk bermigrasi ke kota disebabkan karena *pertama*

merasa terlalu tua, *kedua* perlu merawat tanggungan, *ketiga* gagal memperoleh pekerjaan di kota.

I. STUDI EMPIRIS

Tabel 3. Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul	Alat Aanalisis	Hasil
Dasri Lokiman, Debby Ch. Rotinsulu dan Antonius Y. Luntungan, (2012)	Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Investasi Swasta Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Dampaknya Pada PDRB (ADHK) di Kota Manado Tahun 2003-2012	Analisis statistik inferensia adalah berupa regresi sederhana, regresi berganda dan analisis jalur *(path analyisis)* Metode analisis jalur *(path analysis)* yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.	Hasil penelitian menunjukan Upah Minimum Provinsi dan Investasi Swasta memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Tenaga Kerja. Secara parsial Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja sedangkan investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja. Besarnya Upah Minimum Provinsi ke PDRB melalui tenaga kerja bersifat positif, sedangkan investasi swasta ke PDRB melalui tenaga kerja bersifat negative.
I Gusti Agung Indradewa, Ketut Suardhika Natha, (2013)	Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali	Model ekonometrika dengan metode ordinary Least square (ols)	Hasil penelitian yang di peroleh secara simultan, ketiga variabel bebas yang di uji memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan secara parsial, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, sementara inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan

			tenaga kerja di Provinsi Bali tahun 1994-2013.
Rini Sulistiawati, (2012)	Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesehjateraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia	Pengolahan data menggunakan SPSS versi 17.0 dan model *path analys* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat	Upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
Sarwedi, (2002)	Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor Yang Mempengaruhinya	Model ekonometrika dengan metode ordinary Least square (ols) dengan mengimplikasikan model koreksi kesalahan *(error correlation mode*=ECM*)*	Variabel ekonomi (GDP, *Growth*, *Wage*, dan Ekspor) mempunyai hubungan positif degan FDI variabel non ekonomi yaitu stabilitas politik (SP) mempunyai hubungan negatif. Hal ini sejalan dengan temuan hasil temuan empiris schnneider and frey (1986) bahwa kestabilan politik mempunyai hubungan negative
Rita Nurmalina Suryana, Yusmichad Yusdja dan Memed Gunawan, (1980)	Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja di Lampung	Estimasi kebutuhan tenaga kerja perbulan untuk tanaman perkebunan di peroleh dengan menggandakan luas pertanaman dengan kebutuhan tenaga kerja pada bulan yang bersangkutan	Hasil analisa menunjukan bahwa bagi kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Utara penyediaan tenaga kerja pertanian seharusnya tidak merupakan masalah asal terjadi mobilitas lokal tenaga kerja yang lancar. Namun, penyediaan tenaga kerja tersebut memang merupakan kendala bagi pengembangan pertanian di Lampung Utara

J. Kerangka Pemikiran

Menurut Sudarsono (2004), PDRB dan kesempatan kerja berkolerasi positif, tetapi besar kecilnya pengaruh PDRB terhadap peningkatan kesempatan kerja ditentukan oleh faktor teknologi, dan kualitas tenaga kerja yang digunakan. Menurut Arsyad (1997) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada PDRB menandakan bahwa di Daerah tersebut sedang terjadi kegiatan perekonomian yang meningkat dari sisi permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi melalui perusahaan, dan ketika permintaan itu meningkat maka secara nyata perusahaan akan banyak membutuhkan faktor produksi. Akibaat nya Perusahaan membayar sewa jasa terhadap tenaga kerja atas jasa yang dikerjakannya. Panayotou (1998), Menjelaskan bahwa PMA penting dalam menjamin kelangsungan pembangunaan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya *FDI (Foreign Dierect Investment)* disuatu negara akan diikuti dengan transfer *of technology, management skill*, resiko usaha relatif kecil dan lebih *profitable.*

Investasi PMA salah satu investasi yang akan berpengaruh dalam jangka panjang terhadap perekonomian selain yang sifatnya permanen juga akan meningkakan kesempatan kerja karena secara nyata dana yang dibawa oleh pihak asing ke Negara tujuan akan dibelanjakan baik untuk membangun pabrik baru, teknologi baru yang pada akhirnya mebutuhkan faktor produksi untuk mengerjakan nya dalam proses

produksi. Pendapat tersebut di dukung oleh Sukirno (2004), dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian.

Perubahan upah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, bagi perusahaan upah merupakan biaya produksi sehingga pengusaha akan meminimalkan biaya produksi, yaitu upah untuk mencapai keuntungan yang optimal. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Apabila harga naik, konsumen akan mengurangi konsumsi. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka pemikiran dapat di gambarkan pada gambar berikut:

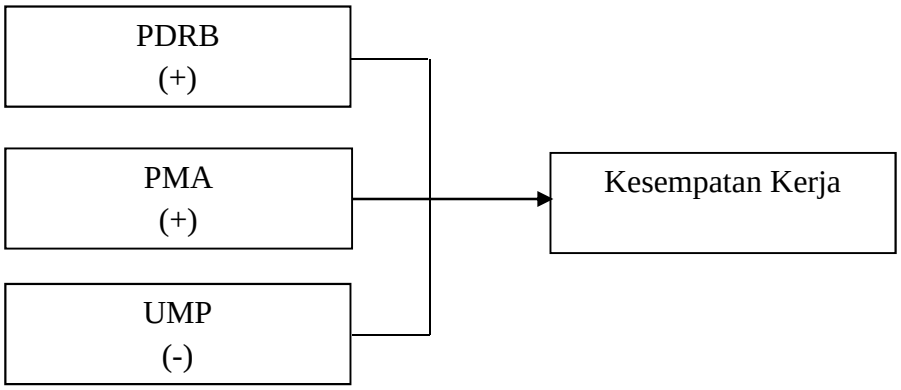

Gambar 5. Kerangka Pemikiran

1. **Hipotesis**

   a. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Provinsi Lampung.

   b. Diduga PMA berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Provinsi Lampung.

   c. Diduga UMP berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja di Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder tahunan dan merupakan jenis data *time series* (runtun waktu). Data sekunder tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dalam angka, dan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung (BPMD) tahun 2001-2015.

Tabel 4. Nama Variabel, Simbol, Satuan Pengukuran, Sumber Data, Periode

Nama Variabel	Simbol	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Periode Observasi
Kesempatan Kerja	KK	Juta Jiwa	BPS	2001-2015
PDRB	PDRB	Rp Milyar	BPS	2001-2015
PMA	PMA	Juta U$	BPMD	2001-2015
UMP	UMP	Ribu Rupiah	BPS	2001-2015

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung instansi terkait melalui studi pustaka untuk mendapatkan informasi data melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kesempatan kerja Provinsi Lampung.
2. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, PDRB, PMA, dan Upah Minimum Provinsi.

D. Devinisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman terhadap variabel variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional sebagai berikut Publikasi BPS Provinsi Lampung (2015).

1. Kesempatan Kerja

   Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja disini tidak menunjukkan pada potensi tetapi pada fakta jumlah orang yang bekerja. Data kesempatan kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja atau memiliki pekerjaan di Provinsi Lampung yang nilainya dinyatakan dalam juta jiwa selama dari tahun 2001 hingga tahun 2015.

2. PDRB

   PDRB yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha yang dinyatakan dalam milyar rupiah.

3. PMA

   Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). PMA dinyatakan dalam jumlah investasi dari tahun 2001 hingga tahun 2015 dengan satuan tetapan yang dinyatakan dalam juta U$.

4. UMP

   Upah Minimum Provinsi adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

E. Metode Analisis

Metode ekonometrika yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana atau *Ordinary Least Square*. Menurut Widarjono (2013), menerangkan bahwa bahwa metode ini berfungsi untuk menganalisis hubungan ketergantungan dari satu atau beberapa variabel dependen terhadap variabel lainnya, yaitu variable independen. Dalam melakukan analisis terhadap hubungan antar variabel tersebut, pengolahan data dilakukan dengan

bantuan program Eviews 9. Fungsi persamaan dasar yang akan diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KK = f\ (PDRB, PMA, UMP)$$

Di aplikasikan dalam variabel menjadi

$$KK = \beta_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 PMA - \beta_3 UMP + \mu_t$$

Dimana:

β_0 = Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$ = Koefisien Regresi

KK = Kesempatan Kerja (Juta jiwa)

PDRB = PDRB (Rp Milyar)

PMA = PMA (Juta U$)

UMP = Upah Minimum Provinsi

μ_t = komponen *error term.*

F. Uji Asumsi Klasik

Agar model regresi yang diajukan menunjukan persamaan hubungan yang valid *BLUE (Best Linier Unbiased Estimator),* model tersebut harus memenuhi asumsi-asumsi dasar klasik *Ordineary Least Square* (OLS) asumsi-asumsi tersebut antara lain:

a. Tidak terdapat autokorelasi (adanya hubungan antara masing-masing residual observasi).
b. Tidak terjadi multikolinearitas (adanya hubungan antar variabel bebas).

c. Tidak ada heteroskedastisitas (adanya *variance* yang tidak konstan dari variabel pengganggu). Sebelum melakukan uji regresi, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang baik, yaitu:

1. Uji Asumsi Normalitas Metode Jarque – Bera (J-B)

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak berlaku. Untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi, dapat digunakan Jarque-Bera (J-B) test dengan membandingkan nilai J-B hitung dan nilai χ^2 (Chi-Square) tabel. Apabila nilai J-B hitung < nilai χ^2 (Chi-Square) tabel, maka nilai residual terdistribusi normal (Widarjono, 2013).

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan variabel dari model regresi. Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen memiliki hubungan linier terhadap variabel independen lainnya (Widarjono, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam sebuah model regresi dapat dilakukan dengan melakukan regresi bantuan *(auxiliary regression)*, yaitu dengan cara melakukan *auxiliary regression* antar variabel independen.

Nilai R^2 dari masing-masing regresi antar variabel independen kemudian dibandingkan dengan R^2 model utama, jika nilai R^2 dari hasil *auxiliary regression* lebih besar dari R^2 model utama, maka terdapat multikolinieritas. Selain itu Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat *tolerance value* atau dengan menggunakan *Variance Inflation Factors (VIF)* dari hasil analisis dengan menggunakan eviews. Nilai VIF dapat dihitung dengan rumus yaitu sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{(1 - R^2)}$$

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor (VIF).* Multikolinieritas terjadi bila nilai VIF diatas nilai 10 atau *tolerance value* dibawah 0,10. Multikolinieritas tidak terjadi bila nilai VIF dibawah nilai 10 atau tole*rance value* diatas 0,10 (Widarjono, 2013).

3. Uji Autokorelasi

Suatu model regresi dikatakan terkena autokorelasi, jika ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (periode sebelumnya). Autokorelasi hanya ditemukan pada regresi yang datanya time series. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji (D) dari metode Durbin-Watson, Widarjono (2013). Deteksi autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Durbin-Watson hitung dengan Durbin-Watson tabel. Adapun prosedur dari uji DW sebagai berikut:

1. Melakukan regresi metode OLS dan kemudian mendapatkan nilai residualnya.
2. Menghitung nilai d

3. Dengan jumlah observasi (n) dan jumlah variabel independen tertentu tidak termasuk konstanta (k), kita cari nilai kritis dL dan Du di stasistik Durbin Watson.

   Uji Durbin-Watson pengambilan keputusannya:

   1. Jika nilai DW yaitu d = 0, artinya ada autokorelasi positif
   2. Jika nilai DW yaitu = 4, artinya ada autokorelasi negative
   3. Jika nilai DW yaitu = 2, artrinya tidak ada autokorelasi

Breusch dan Godfrey mengembangakan uji autokorelasi yang lebih umum dan dikenal dengan uji LM atau LM *test*. Jika nilai Chi-Squares hitung lebih kecil dari nilai kritisnya, maka kita menerima hipotesis nol. Artinya model ini tidak mengandung unsur autokorelasi karena semua p *value* sama dengan nol. Dan jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai α yang dipilih maka kita menerima Ho yang berarti tidak ada autokorelasi.

4. Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedasitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedasitas juga bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi homoskedasitas yaitu variasi residual sama untuk semua pengamatan. Secara ringkas walaupun terdapat heteroskedasitas maka penaksir OLS *(Ordinary Least Square)* tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar, Widarjono, 2013.

Penelitian ini menggunakan uji white untuk menguji ada tidaknya heteroskedasitas. Dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan

ke pengamatan lainnya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya heteroskedasitas antara lain dengan menggunakan uji white. Uji *white* dapat menjelaskan apabila nilai probabilitas obs*R-square lebih kecil dari α (5%) maka data bersifat heteroskedasitas begitu pula sebaliknya.

G. Uji Hipotesis

1. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F-statistik)

Pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F-statistik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas yang terdapat dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat Widarjono, (2013).

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam uji-F statistik pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan df_1 = (k-1) dan df_2 = (n-k).

1. H_0: β_1, β_2, $\beta 3$ = 0 (Semua variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependent secara bersama-sama).
2. H_a :β_1, β_2, $\beta 3$ ≠ (Paling tidak salah 1 koefisien regresi tidak sama nol maka variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependent secara bersama-sama).

Untuk menguji hipotesis ini digunakan F-statistik dengan kriteria pengambilan keputusan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel.

a. Ho diterima dan Ha ditolak apabila F-hitung < F-tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
b. Ho ditolak dan Ha diterima apabila F-hitung > F-tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

2. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t-statistik)

Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual Widarjono, (2013). Digunakan uji 1 arah dengan tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis.

1. H_0:β_1 = 0 PDRB tidak berpengaruh terhadap KK

   Ha: β_1 > PDRB berpengaruh positif terhadap KK
2. H_0:β_2 = 0 PMA tidak berpengaruh terhadap KK

   Ha: β_2 > 0 PMA berpengaruh positif terhadap KK
3. H_0:β_3 = 0 Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh terhadap KK

   Ha: β_3 < 0 Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif terhadap KK

   a. Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka H_0 ditolak atau menerima H_a
   b. Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka H_0 diterima atau menolak H_a

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 menjelaskan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi nilai variabel independen. Nilai R^2 yang kecil bukan berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi nilai variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu artinya bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi nilai variabel independen. Nilai R^2 antara 0 sampai dengan 1, bila nilai R^2 sama dengan 1 maka garis regresi yang dicocokkan mampu menjelaskan 100 persen variasi nilai variabel dependen. Bila R^2 sama dengan 0 berarti variabel-variabel independen yang digunakan tidak dapat menjelaskan satupun variasi dalam variabel dependen. Nilai R^2 yang lebih baik apabila semakin dekat dengan 1 (Widarjono, 2013).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dijelaskan di bab IV, dapat ditarik kesimpulan terkait tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Lampung. Peningkatan PDRB dengan tahun dasar tertentu akan meningkatkan kesempatan kerja, karena pasar tenaga kerja hanya mengikuti apa yang terjadi dipasar barang, apabila output yang diproduksikan naik maka jumlah orang yang dipekerjakan juga akan naik.
2. Variabel PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Lampung. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional kemudian akan mempengaruhi jumlah industri sehingga terbuakanya kesempatan kerja.
3. Variabel UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan. Bertambahnya nilai upah ini bisa menyebabkan meningkatkan kehidupan layak seorang pekerja, tetapi jika peningkatan nilai upah terlalu tinggi yang tidak disertai dengan peningkatan produktivitas kerja akan mendorong pengusaha untuk

mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi sehingga menggunakan teknologi yang lebih padat modal.

B. Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kesempatan kerja di Provinsi Lampung antara lain:

1. Berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pemerintah diharapkan lebih meningkatkan output sektor dan sub sektor supaya penyerapan tenaga kerja meningkat terus dari tahun ke tahun.

2. Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi seperti memperbaiki sarana dan prasarana publik yang rusak, menjaga keamanan, mempermudah perijinan agar para investor lebih mudah untuk mendirikan suatu usaha serta pertumbuhan investasi ke arah yang bersifat padat karya agar kesempatan kerja terbuka luas sehingga akan memperkecil tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

3. Berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), pemerintah Provinsi Lampung harus menetapkan kebijakan upah secara tepat untuk meningkatkan kehidupan yang layak khususnya bagi para pekerja tetapi juga tanpa merugikan kelangsungan hidup perusahaan.

Daftar Pustaka

Arsyad, Lincolin. 1997. *Pengntar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta. BPFE UGM.

Ananta, Aris. (1990). *"Kesehatan, Sumberdaya Manusia dan Pembangunan Ekonomi"*, dalam Prisma. Edisi XIX, No.6.

Agung, I Gusti Indradewa. Suardhika, Ketut Natha. 2013. *Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali*. E-Jurnal EP. Universitas Udayana.

Aryanto, Rudi. 2011. "Analisa Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan". Journal Ilmiah. Vol. III, No. 2, pp. 98-115.

Budi, Utami Turminijati. 2004. *Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, PDRB, Angkatan Kerja Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Di Kabupaten Jember*. Alumni Pasca Sarjana Universitas Jember. Program Studi Ilmu Ekonomi. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan. Vol. 1, No. 1, 2009.*

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2015. *Lampung Dalam Angka 2015*. Lampung.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2016. *Lampung Dalam Angka 2016*. Lampung.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2017. *Lampung Dalam Angka 2017*. Lampung.

Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Lampung 2016.

Depnakertrans. 2004. *Penanggulangan Pengangguran di Indonesia*, Majalah Nakertrans Edisi . 03 TH.XXIV-Juni.

Deliarnov. 1995. *Ekonomi makro*. Jakarta: UI Press.

Gianie. 2009. *Pengaruh Upah Minimu Terhadap Penyerapan Tenaga kerja Berpendidikan Rendah Di Sektor Industri dan Perdagangan.* Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Iksan, Mohamad. 2010. *Upah Minimum Regional dan Kesempatan Kerja. Mencari Jalan Tengah.* http://els.bappenas.go.id. Diakses tanggal 2 Agustus 2017.

Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.* PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Krugman, *Obsfield* (1991), *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijaksanaan* (terjemahan), Rajawali Press, Jakarta.

Kholifah, Anggrainy. 2013. Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (Umk) Terhadap Kesempatan Kerja Dan Investasi (Studi Kasus Pada Kota Malang Periode 2001-2011). *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Kemenakertrans, Standarisasi Kebutuhan Hidup Layak, 2015.

Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Kusnendi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Kamus Besar, *Bahasa Indonesia.* 2002. Erlangga. Jakarta.

Knight, John. Deng Quheng. & Li Shi, 2011. *The Puzzle of Migrant Labour Shortage and Rural Labour Surplus in China.China Economic Review*. CHIECO-00506; pp 1-16.

Lokiman, Dasri, Debby Ch. Rotinsulu dan Antonius Y. Luntungan,. 2012. *Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Investasi Swasta Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Dampaknya Pada PDRB (ADHK) di Kota Manado Tahun 2003-2012).* Jurnal Berkala Efisiensi. IEP – FEB Unsrat Manado.

Mankiw, N. Georgy. 2001. *Pengantar Ekonomi.* Erlangga. Jakarta.

Mulyadi, Subri. 2002. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta PT Raja.

Mudrajad, Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nurmalina, Rita S. Yusdjha, Yusmichad. Gunawan, Memed. 1980. *Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja di Lampung.* Jurnal Ilmiah. Staf Peneliti Agro Ekonomi.

Nicholson, Walter. 2002. *Mikro Ekonomi Intermediate.* Erlangga. Jakarta.

Panayotou, *Theodore* (1998), *Investments of Change : Motivating and Financing Sustainable Development, Earthscan Publications, London.*

Payaman J. Simajuntak, 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LPFE UI.*

Prasetyo, P. Eko. 2009. Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta: Beta Offset.

Rosyidi, Suherman.2000. Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta:Erlangga.

Susilawati, Rini. 2012. *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesehjateraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia.* Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak. Vol. 8, No. 2, 2012, hal. 195-211.

Sarwedi. 2002. Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor Yang Mempengaruhinya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Universitas Negeri Jember. Vol. 4. No. 1. Mei. 2002.

Salim H.S., S.H., M.S. dan Budi Sutrisno, S.H., M.Hum. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia.* Jakarta: Grafindo Persada.

Soeroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Edisi Kedua. Penerbit Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta. Raja Grafindo.

Sudarsono. 2004. *Pengaruh Diferensiasi Upah Antara Provinsi Terhadap Kesempatan Kerja.* Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 9, No. 2, 2004, hal. 117-127.

Sodik & Didi. 2005. “Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Provinsi Di Indonesia Pra Dan Pasca Otonomi)”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 2. Hal: 157 – 170.

Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Safina, Lailan dan Endang, Sri Rahayu, "*Jurnal Manajemen dan Bisnis"*. Vol 11 NO. 01 April 2011 ISSN 1693-7619.

Suharyadi, Asep. Widyanti, Wenefrida. Perwira, Daniel. Sumarto, Sudarno. 2002. *Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal Perkotaan.* Jurnal Analisis Sosial. Vol. 7, No. 1 Februari 2002.

Todaro , Michael, P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004.

Tambunan, Tulus, 2001. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tarigan, Robinson. 2009. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Cetakan kelima. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Utami, Turminijati Budi. 2009. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten,PDRB, Angkatan Kerja dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Vol. 1 No. 1*.

Universitas Lampung. 2016. *Format Penulisan Karya Ilmiah.* Universitas Lampung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing.

Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Widarjono, Agus. 2013. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.